

# WES - Newsletter

## WATER and ENVIRONMENTAL SANITATION

### AIR MINUM dan PENYEHATAN LINGKUNGAN



Media Informasi Proyek WES-UNICEF Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF

## Agenda

- ◆ 02 - 05 Juni 2009  
Lokakarya Nasional Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Bangka Belitung
- ◆ 08 Juni 2009  
Pertemuan Persiapan Lokakarya Sanitasi Sekolah  
Sekretariat Pokja AMPL, Menteng - Jakarta
- ◆ 09 Juni 2009  
Misi Evaluasi Kabupaten Kota Kupang Kantor BKKBN Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur
- ◆ 10 - 12 Juni 2009  
Misi Evaluasi Kabupaten Rote Ndao Bappeda Kabupaten Rote Ndao - Nusa Tenggara Timur
- ◆ 12 - 13 Juni 2009  
Sosialisasi *Programme Implementation Document* (PID) Kota Mataram Hotel Lombok Garden, Mataram - Nusa Tenggara Barat
- ◆ 17 Juni 2009  
Rapat Konsolidasi Sekretariat WES dan WES Section UNICEF Wisma Bakrie II - Jakarta
- ◆ 18 - 20 Juni 2009  
Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan *Hygiene dan Sanitasi Sekolah* Hotel Ria Diani, Bogor - Jawa Barat
- ◆ 25 Juni 2009  
Pembahasan *WASPOLA Facility* Hotel Four Seasons - Jakarta
- ◆ 26 Juni 2009  
Rapat Konsolidasi Pokja AMPL - WES Sekretariat Pokja AMPL, Menteng - Jakarta
- ◆ 30 Juni 2009  
*WASH Training* Bali
- ◆ 01 - 03 Juli 2009  
*Mid Year Review* Bandung - Jawa Barat
- ◆ 09 Juli 2009  
Lokakarya Konsolidasi Sanitasi Sekolah Hotel Ibis - Jakarta

## 1000 Penampung Air di Pulau Ende

Pulau Ende di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, kini memiliki julukan baru, yakni pulau 1.000 penampung air hujan. Setidaknya sejak tiga tahun lalu, masyarakat tidak terlalu nelangsa soal air bersih karena cukup terpenuhi dari teknologi penampung air hujan. Bagi mereka, air tampung-



Warga sedang berfoto di depan salah satu penampung air yang ada di Pulau Ende foto: Fany



an senikmat air alami pegunungan yang jernih.

Bertahun-tahun, masyarakat dalam kegetiran, terutama sulit mendapatkan air bersih untuk minum dan memasak. Mereka amat merindukan mereguk air tawar yang bersih dan sehat.

Untuk memperoleh air minum yang sehat, mereka harus mencarinya hingga Numba atau Kota Ende di daratan Flores. Itu berarti harus menyeberang laut dengan perahu motor sekitar tiga jam perjalanan pergi-pulang.

Namun, dengan adanya penampung air hujan, warga Pulau Ende kini tak lagi bersusah payah mencari air ke Numba atau Kota Ende dengan biaya besar. Sedikitnya 8.700 jiwa warga Pulau Ende saat ini sudah lepas dari kesulitan air bersih yang diderita turun-temurun.

Ny Sumiati, warga Rorurangga yang lain, mengungkapkan, dengan mengonsumsi air dari penampung air hujan, keluarganya tak lagi sering mencret. "Waktu dulu kami mengonsumsi air sumur di sini sering sakit perut dan mencret karena mungkin memasak air tidak terlalu matang. Air dari sumur kalau makin lama dimasak rasanya malah makin asin," ujarnya.

Pulau Ende secara topografi merupakan daerah kepulauan dengan tekstur tanah berpasir dan tandus. Penduduknya mayoritas nelayan. Secara hidrologi, di Pulau Ende tidak terdapat air tanah yang memenuhi syarat kesehatan, baik

secara fisik maupun bakteriologis. Hal itu termasuk 227 sumur gali.

Berbagai upaya pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten bersama lembaga donatur telah dilakukan guna melayani kebutuhan air bersih melalui pemboran air tanah, eksploitasi air dari daratan Pulau Flores, serta penyulingan air laut dengan sistem tenaga surya. Namun, semuanya tak kunjung membuahkan hasil memuaskan.

Namun, semuanya tak kunjung membuahkan hasil memuaskan.

Badan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF) akhirnya membantu dengan membangun penampung air hujan. Bantuan itu disalurkan melalui Program Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan periode 2006-2010.

UNICEF membantu pembangunan penampung Rp 1,3 juta per unit. Dana itu hanya untuk pengadaan material nonlokal, sedangkan untuk material lokal dan biaya tenaga tukang dilakukan secara swadaya oleh warga. Biaya pembuatan satu penampung air hujan Rp 6,5 juta.

Penampung yang dibangun berkapasitas 4.000 liter dengan konstruksi beton. Pembangunan mulai dilakukan tahun 2006 secara bertahap dan tuntas di tujuh desa tahun 2008.

Menurut penanggung jawab operasional Program Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Dukungan UNICEF untuk Kabupaten Ende, Petrus H Djata, total 1.553 penampung dibangun di rumah-rumah warga. Selain itu, dibangun 97 penampung di fasilitas umum, seperti kantor desa, kecamatan, dan puskesmas, serta fasilitas sosial, seperti masjid. ■

Sumber:  
KOMPAS, Edisi 18 Juli 2009

## Lokakarya Konsolidasi Program Sanitasi Sekolah

Program sanitasi sekolah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui departemen terkait, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Peker-

jaan Umum, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, tetapi banyak pula lembaga-lembaga lain di luar pemerintahan yang turut menjalankan program tersebut. Meski banyak program yang dijalankan, namun dalam penerapannya, hingga kini para pelaku sanitasi sekolah masih berjalan sendiri-sendiri. Belum terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan program sanitasi sekolah, Jejaring AMPL memfasilitasi untuk mempertemukan para pelaku sanitasi sekolah melalui suatu pertemuan konsolidasi. Pertemuan konsolidasi ini telah dilaksanakan pada 9 Juli 2009 lalu, bertempat di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan

dari pemerintah pusat, yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan, dan perwakilan dari lembaga-lembaga non-pemerintah, seperti LSM (ESP, Mercy Corps dan WES UNICEF), program/proyek terkait dan donor.

Dalam pertemuan konsolidasi tersebut, selain melakukan pemetaan program, digali pula isu-isu strategis yang muncul terkait pelaksanaan program sanitasi sekolah. Setelah itu, para peserta yang hadir secara bersama-sama turut merumuskan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarpelaku sanitasi sekolah. Dengan terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan terjadi sinergi dalam pelaksanaan program sanitasi sekolah dan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas lagi. ■ DA/DH



Tampak para pembicara dalam lokakarya tersebut  
foto: Bowo



## Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman) 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2006-2010 untuk Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPA)

Bertempat di Bandung berlangsung Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman) 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI dengan UNICEF Periode 2006-2010 untuk Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPA) pada tanggal 1-3 Juli 2009. Pada kesempatan tersebut Melkias dari Pokja AMPL NTT menjadi salah satu pembicara. Topik utama adalah kondisi dan perkembangan AMPL NTT.

Secara umum, kondisi NTT memang relatif sulit terlihat dari 20 persen dari desa merupakan desa rawan air, hujan hanya berlangsung 4 bulan, pendapatan per kapita rata-rata hanya 24 persen dari nasional, sekitar 28 persen penduduk berada dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah.

Sementara sumber air penduduk sebagian besar dari mata air (36

persen), sumur gali (31 persen), perpipaan (22 persen). Sekitar 33 persen keluarga belum mempunyai jamban.

NTT merupakan salah satu daerah favorit donor terkait pembangunan AMPL, terlihat dari banyaknya lembaga *eksternal* yang beroperasi di NTT diantaranya AusAID, Care Indonesia, CCF, Plan Indonesia, UNICEF, WVI, GTZ. Untuk itu telah dibentuk sejak lama Sekretariat Bersama yang mengkoordinasikan keberadaan lembaga tersebut.

Ketersediaan dana pemerintah sendiri masih belum memadai. Alokasi dana AMPL hanya 0,3 persen dari APBD Propinsi NTT atau sekitar Rp. 3 miliar per tahun. DAK Pengembangan Air Minum dan Sanitasi sekitar Rp. 5 miliar.

Isu utama adalah konflik sumber air, kerusakan sumber air, rendahnya tingkat keberlanjutan, kurangnya kesiapan masyarakat dan pemda,

masih rendahnya koordinasi, dan keterbatasan SDM.

Pokja AMPL NTT sejak tahun 2009 telah mulai aktif terlihat dari pertemuan berkala yang telah berlangsung 6 kali. Rapat dilaksanakan secara bergantian tidak hanya di kantor pemerintah tetapi juga di kantor LSM.

Salah satu produk unggulan Pokja AMPL adalah Sistem Informasi Geografis (GIS) AMPL yang mencakup area layanan, akses, sumber air, teknologi, dan keberlanjutan. Pada setiap Rakorman ditetapkan satu propinsi yang dianggap mempunyai praktek unggulan untuk mewakili masing-masing kegiatan. Program UNICEF mempunyai sekitar 8 kegiatan diantaranya AMPL. Berbeda dengan program hibah lainnya, kegiatan UNICEF diserahkan pelaksanaannya ke pemerintah daerah dengan mendapat fasilitasi dari UNICEF dan pemerintah pusat. ■ OM

## Sosialisasi *Project Implementation Document (PID)* Komponen Perkotaan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan sosialisasi *Project Implementation Document (PID)* Kota Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2009 di Hotel Lombok Garden merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat WES UNICEF dalam rangka pelaksanaan persiapan program WES UNICEF.

Agenda dalam sosialisasi PID ini antara lain, sosialisasi PID dan penyusunan Rencana Kerja WES UNICEF Perkotaan Tahun 2009 – 2010, yang di ikuti oleh perwakilan Pokja AMPL Kota Mataram, *Project Officer* UNICEF Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat WES.

Dalam sambutan pembukaan

yang dilakukan oleh Kepala Bappeda Kota Mataram menyatakan kegiatan sosialisasi PID penting dalam rangka memberikan pemahaman filosofi program yang sama bagi semua pelaku utama program WES. Kegiatan ini akan memiliki dampak positif khususnya dalam mensinergikan antar pelaku, dimana pelaksanaan program WES UNICEF di Kota Mataram juga melibatkan LSM lokal.

Proses kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan presentasi oleh fasilitator dari sekretariat WES UNICEF oleh Willy Irawan dengan metode presentasi terpusat dan diskusi langsung dengan peserta

mengenai PID Perkotaan Program WES-UNICEF. PID yang sudah tersosialisasi memberikan gambaran kepada Pokja Kota Mataram mengenai rencana kerja apa yang harus disusun untuk tahun 2009 – 2010.

Dengan panduan fasilitator, peserta menyusun rencana kerja mulai dari tahap persiapan kelembagaan, penguatan kapasitas, persiapan masyarakat, pelaksanaan konstruksi hingga paska pelaksanaan program. Rencana kerja yang tersusun kemudian disepakati dan akan segera dilaporkan untuk ditandatangani oleh Kepala Bappeda. ■



## TOT (*Training of Trainers*) Pengelolaan Data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Jayapura

Berempat di Hotel Matoa Jayapura, tanggal 29-30 Juni 2009 telah berlangsung pelatihan untuk para pelatih (TOT, *Training of Trainers*) pengelolaan data Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). TOT dibuka oleh Wakil Walikota Jayapura, Sudjarwo. ToT ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pokja AMPL Kota Jayapura dalam pengelolaan

data AMPL, meningkatkan pemahaman terhadap konsep pengelolaan data dan meningkatkan keterampilan fasilitasi melalui praktik lapangan.

TOT diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari SKPD terkait (Bappeda, PU, Dinkes, PMD), BPS, PDAM., perwakilan distrik (kecamatan), kampung (desa), tokoh masyarakat, LSM (Care International), dan proyek terkait AMPL (ESP dan WES). Fasilitator atau instruktur adalah Dormaringan Saragih dan Udi Maadi dibantu oleh Pokja Kota Jayapura.

Selain mendalami prinsip-prinsip pengelolaan data AMPL, kerangka ker-

ja dalam pengelolaan data, kuesioner dan panduan pelaksanaan, serta tips fasilitasi di kelas, peserta juga mengunjungi Desa Gurabessi untuk mempraktekan teknik penggunaan panduan dan pengisian format data AMPL dan sekaligus mendapatkan pembelajaran aplikasi metode pengelolaan data AMPL. Hasil praktek selanjutnya didiskusikan kembali di kelas. Poin tentang substansi, proses pendataan, perangkat (*tools*) dan faktor pendukung/penghambat menjadi tema menarik dalam diskusi tersebut.

Rencana tindak lanjut pasca pelatihan, tersusun beberapa kegiatan lanjutan, diantaranya menyempurnakan format data, pertemuan Pokja AMPL, identifikasi dan pemilihan *enumerator*, pelatihan *enumerator* dan pelatihan pengolahan data AMPL. ■ **DHS**



Para peserta TOT Pengelolaan Data AMPL Kota Jayapura  
foto: Dorman

## Diskusi Media “Merespon Debat Capres: Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dari Sudut Pandang Sektor Sanitasi”



Para pembicara sedang menanggapi sebuah pertanyaan  
foto: Bowo

Tak sekalipun kata “sanitasi” terucap dari calon presiden dalam debat capres putaran kedua, Kamis, 25 Juni 2009 bertema “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran”. Padahal, sektor ini turut menyumbang kerugian ekonomi sebesar Rp 58 triliun dengan kenyataan yang masih ada bahwa 80 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktik buang air besar (BAB) sembarangan.

Bagaimana sebenarnya terminologi sanitasi dalam benak para calon presiden yang kesemuanya sepakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran? Apakah realita kerugian ekonomi yang sangat besar akibat buruk sanitasi itu akan menjadi perhatian utama bagi para capres bila terpilih nantinya?

“Kami bukan memperhatikan sanitasi, tapi saat SBY memimpin anggaran lebih untuk memprioritaskan bencana yang banyak terjadi di Indonesia,” ungkap Dian Syakhroz, tim sukses SBY-Boediono dalam acara Diskusi Media untuk Merespon Debat Capres bertema “Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dari Sudut Pandang Sektor Sanitasi” digelar pada Jumat, 26 Juni 2009, di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan.

Sementara dari tim sukses JK-Wiranto, Zarmansyah, mengaku membicarakan soal sanitasi dan persoalan lain negeri ini sedetail-detailnya. Disayangkan, perwakilan dari tim sukses Mega-Prabowo tidak hadir dalam kesempatan itu, sehingga tidak terungkap bagaimana ungkapan capres yang mengklaim pro rakyat itu.

Hadir pula Aviliani, peneliti INDEF, yang mengatakan bahwa berbicara kemiskinan dan sanitasi adalah bicara anggaran. Menurutnya, sejak era reformasi dengan adanya otonomi daerah, anggaran untuk rakyat berkurang karena terserap untuk pemekaran daerah. “Kenyataan lain bahwa konsep tata ruang terkait sanitasi, tidak terjadi koordinasi yang baik antardaerah. Seharusnya pemerintah pusat yang menetapkan,” tutur ekonom yang juga komisaris Bank Rakyat Indonesia ini.

Menurut Direktur Dana Mitra Lingkungan Kemal Taruc, semestinya para calon presiden itu memulai dengan permintaan maaf kepada rakyat atas semua data statistik terkait buruknya sanitasi di Indonesia. “Tapi yang terjadi, masing-masing capres malah berlomba-lomba menunjukkan sikap arogansinya dengan mengklaim kesuksesan,” tutur koordinator Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTGS).

### Kembali Berjanji

Zarmansyah mengatakan, soal sanitasi akan dibahas lebih dalam oleh JK pada debat capres berikutnya yang artinya, JK akan mengobrol janji terkait penanganan sanitasi di Indonesia. Sementara Dian Syakhroz ber-

janji bila SBY terpilih akan lebih fokus lagi pada masalah sanitasi.

Praktis apa yang terungkap dari perwakilan kedua tim sukses capres dalam diskusi media tersebut sama sekali tidak menyentuh substansi dan cenderung tidak menguasai permasalahan. Apakah akibat buruk sanitasi di negeri ini akan bisa diselesaikan hanya dengan janji dari para penyelenggara negara? Tentu mustahil.

Tetapi paling tidak, diskusi yang digagas Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) bekerjasama dengan Jejaring AMPL dan didukung oleh Pokja AMPL, UNICEF, dan ESP ini mampu mendorong perhatian semua pihak terhadap sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Dan kedepannya diharapkan, siapapun presiden dan wakil presidennya, AMPL menjadi bagian arus utama pembangunan di Indonesia. Semoga! ■ BW



WES-UNICEF

Water and Environmental Sanitation

Gedung Wisma Bakrie II, Lt.5  
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2  
Kuningan - Jakarta  
Telp./Fax.: (6221) 57942100  
email:  
[sekretariat@wes-riunicef.org](mailto:sekretariat@wes-riunicef.org)

<http://wes-riunicef.org>